



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 10%

Date: Saturday, June 13, 2020

Statistics: 356 words Plagiarized / 3713 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

SEKOLAH **KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP)** DARING SEBAGAI SARANA
PENDIDIKAN PEMILU DAN PILKADA DITENGAH PANDEMI COVID-19 Ahmad Saufi^{1*},
Ahmad Faiz², Muhammad Rezky Yanuar³ ¹Departemen Administrasi Publik, Universitas
Diponegoro, Semarang saufi_kayong2@yahoo.co.id ²Departemen Administrasi Publik,
Universitas Diponegoro, Semarang ahmadifaiz3@gmail.com ³Departemen Administrasi
Publik, Universitas Diponegoro, Semarang rezkiyanuar90@gmail.com

ABSTRAK __Abstrak: Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah sebuah gerakan yang diinisiasi Bawaslu bersama masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas.

Metode Daring digunakan dalam pembelajaran ini merupakan sebuah inovasi dengan pemamfaatan teknologi informasi dan media sosial sebagai upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Materi pembelajaran ini terdiri dari 9 topik dengan jumlah 50 slide halaman yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi se Indonesia.

Tujuan dari pembelajaran ini adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pemahaman akan tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga memiliki dampak keterlibatan yang begitu tinggi dari masyarakat. Pendidikan pengawasan partisipatif juga meningkatkan ruang diskusi intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Menciptakan kader pengawas sebagai penggerak masyarakat dalam mengawasi proses pilkada serentak 2020. Hasil kegiatan ini secara jangka pendek peserta diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif didaerahnya masing-masing. Sedangkan jangka panjang, program ini dapat berkelanjutan dan menjadi model pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami dalam membangun mitra antara bawaslu dengan masyarakat.
Kata Kunci: Sekolah, Pengawas, Partisipatif, Pilkada.

Abstract: The Participatory Supervisor Cadre School is a movement initiated by Bawaslu with the community to create an election process with integrity. The online method used in this study is an innovation with the use of information technology and social media as an effort to strengthen public participation in the supervision of elections and local elections.

This learning material consists of 9 topics with a total of 50 page slides delivered by the Provincial Bawaslu Commissioners in Indonesia. The aim of this lesson is to increase community participatory supervision and understanding of the duties, principles and functions of election and regional election supervision so that it has a high level of community involvement.

Participatory supervision education also increases the space for intensive discussion and becomes a reference for the public in obtaining information. Create a cadre of supervisors as community mobilizers in overseeing the simultaneous local election process in 2020. The results of this activity in the short term are expected to be able to become participatory supervisors in their respective regions.

While for the long term, this program can be sustainable and become an effective and easily understood learning model in building partners between Bawaslu and the community. Keywords: School, Supervisor, Participatory, Local Elections _ _ _ _ Riwayat Artikel: Diterima: ...-Bulan 20XX, Disetujui: ...-Bulan 20XX _ / _ / _ _ [_https://doi.org/10.31764/jces.vXiX.XXX](https://doi.org/10.31764/jces.vXiX.XXX) _This is an open access article under the CC-BY-SA license _ _ _ _

PENDAHULUAN Badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu sangat membutuhkan **dukungan yang kuat dari masyarakat.**

masyarakat memiliki peran aktif dalam memantau proses tahapan dan non tahapan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kolaborasi menjadi kunci saling terikat dalam satu prinsip kepercayaan antara penyelenggara dengan pihak terkait guna meningkatkan partisipasi bersama masyarakat demi mewujudkan **pemilu bersih tanpa politik uang.**

Masyarakat menjadi mitra penting dalam pengawasan baik sebagai relawan pengawas dan pemantau pemilu, forum warga, Saka Adhyatsa (Satuan Karya Pramuka) dan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi **yang menjalin kerjasama dengan** Bawaslu. Tuntutan masyarakat agar pemilu berjalan dengan bersih seiring dengan penguatan kelembagaan secara permanen yang dulunya bersifat adhoc bernama panwaslu (panitia pengawas pemilu) sekarang menjadi lembaga permanen bawaslu di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten dan kota (Suswanto, 2016).

Menurut (Surbakti, 2015), ada beberapa bentuk kegiatan pengawasan diantaranya dengan melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi tentang tata cara tahapan pemilu atau pilkada dan melakukan pemantauan atas setiap tahapan yang sedang berjalan. Hadirnya relasi pengawas dengan masyarakat melahirkan pengawasan partisipatif yang secara yuridis diatur dalam pasal **undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** (pemilu) pada 448 ayat (2) bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa **sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak** tentang pemilu dan perhitungan cepat pemilu (quick count).

Disambung lagi pada ayat berikutnya (3) point b partisipasi tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Menurut (Ramadhanil, 2015), keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mendasar, diantaranya: (1) mewujudkan pemilu yang demokratis; (2) menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan pemilu; (3) menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Pengawasan partisipatif merupakan strategi bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan **sumber daya manusia dan** luasnya cakupan wilayah pengawasan. (Silaban, 2014). Bawaslu pada pemilu 2019 telah sukses membuat Gerakan Pengawas Partisipatif (Gempar) sebagai sebuah langkah konkrit bagi perbaikan dan kontrol sosial masyarakat dalam mengawal pemilu. (Pradana, 2019).

Bawaslu mendapat dukungan moril dari sejumlah organisasi masyarakat, sebanyak 100 lembaga swadaya masyarakat (LSM), 6 perguruan tinggi, 23 organisasi kemahasiswaan dan 9 yayasan dan lembaga riset sebagai pemantau. Partisipasi semua pihak dari proses berjalan maupun hasil akhir disetiap edisi pemilu nasional maupun lokal dapat dipertanggungjawabkan sesuai norma dan etika hukum.

(Solihah R. , 2018). Menurut (Sukma, 2018), anak muda memiliki kerentanan dalam pemahaman politik karena tingginya ketergantungan akan teknologi informasi. Pendidikan akan politik harus bisa melakukan kolaborasi dengan sarana dan prasana yang didukung dengan pengembangan teknologi yang mudah dipahami dan menyenangkan. Pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ini sinergi dengan perhelatan pilkada serentak 2020 yang semula digelar pada 9 september dan diundur menjadi 9 desember, disebabkan adanya wabah Covid-19 (Corona Virus Disease) yang melanda masyarakat awal maret sampai sekarang.

Pengunduran jadwal tersebut seiring terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai langkah mempersiapkan instrumen pengawasan, bawaslu membuat program sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) secara Daring (dalam jaringan) pertama kalinya.

Dukungan teknis dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, bawaslu membentuk tim pokja yang melibatkan unsur diluar penyelenggara sesuai surat edaran nomor;0261/K. Bawaslu/PM.01.00/IV/2020. Tim pokja terdiri pengarah, dan penanggungjawab merangkat ketua, sekretaris dan anggota. Bawaslu membuka informasi pendaftaran sejak 5-8 April 2020 melalui web <http://103.146.202.133/skpp/login.php> dan bisa diakses melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter milik bawaslu.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi harus memenuhi kualifikasi seperti umur minimal 17 dan maksimal 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota, pengurus partai atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir. Syarat lainnya, peserta bukan menjadi bagian dari penyelenggara dan diutamakan bagian dari organisasi masyarakat. Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terlihat dari jumlah yang mendaftar sebanyak 20.665 peserta terdiri dari 12.947 laki-laki (63%) dan 7.718 perempuan (37%).

Kegiatan ini sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi melalui media sosialisasi dan transfer pengetahuan (knowledge sharing) serta keterampilan pengawasan. Menurut (Setiawaty, 2014), pendidikan politik yang

melibatkan CSO (civil society organization) dan lembaga organisasi berbasis pemuda yang mempunyai akses kepada kelompok minoritas seperti pekerja perempuan, tunawisma, disabilitas untuk melakukan pendidikan pemilih yang programatik untuk meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan. Selang sehari setelah penutupan pendaftaran, program ini pun diluncurkan kepada publik bertepatan dengan **hari ulang tahun (HUT)** bawaslu ke-12.

Launching dipimpin ketua bawaslu Abhan, dilaksanakan dari kantor bawaslu, Jakarta Pusat, pada 9 april 2020 melalui aplikasi zoom dilaman <http://zoom.us/j/190019552> dan ditonton secara langsung melalui saluran channel youtube, instagram oleh peserta dan jajaran bawaslu seluruh Indonesia. Abhan dalam sambutannya menyampaikan tujuan jangka pendek dari kegiatan ini adalah terbentuknya pengawas partisipatif, dan mendorong partisipasi masyarakat mengawal demokrasi khususnya pada pilkada sebagai tujuan jangka panjang.

Pendidikan politik yang berkesinambungan, terbuka, dan terprogram sebagai upaya efektif untuk mengajak masyarakat terlibat secara langsung dan aktif. (Triono, 2017). Tanggung jawab bersama untuk melahirkan pemimpin daerah yang kaya visi dan inovasi, integritas yang tinggi untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan yang dilakukan pertama kali secara daring tentu banyak hal yang dijadikan refleksi pada semua proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan ini berada di Kabupaten ketapang dengan mendeskripsikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dan untuk mempermudah penyusunan dibuatlah panduan pertanyaan sebagai berikut: 1). Bagaimana pola pembelajarannya dan target waktu dan tahapan penyelesaian pembelajaran? 2) Bagaimana indikator capaian keberhasilan pembelajaran? 3).

Apa saja **faktor-faktor penghambat dalam proses pembelajaran** tersebut? METODE PELAKSANAAN Metode pembelajaran berbasis **teknologi informasi dan komunikasi** atau disebut e-learning bertujuan untuk mengaktifkan siswa atau peserta **belajar kapanpun dan dimanapun** secara efektif dan efisien. (Dahiya, 2016). Istilah e-learning memiliki dua tipe, **pertama synchronous** berarti pada waktu yang sama.

Proses **pembelajaran terjadi pada saat** bersamaan antara pengajar, peserta dan komponen jaringan internet. Pengajar memberikan materi presentasi (power point) dan peserta didik mendengarkan secara langsung. Peserta **dapat mengajukan pertanyaan atau komentar melalui chat window.**

Tipe ini sering disebut dengan virtual classroom **merupakan gambaran dari kelas nyata,**

namun bersifat maya. Kedua, asynchronous berarti tidak pada waktu bersamaan. Tipe ini memberi kemudahan bagi peserta untuk mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Peserta dapat melaksanakan dan menyelesaikannya setiap saat sesuai rentang waktu yang sudah ditentukan.

Pembelajaran dapat berbentuk bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, tes, kuis dan pengumpulan tugas. Menurut (Rohmah, 2016), manfaat dari pembelajaran e-learning diantaranya adalah : (1) efektif waktu dan ekonomis; (2) interaksi peserta dengan bahan materi menjadi lebih mudah; (3) peserta dapat berbagi informasi dan mengakses materi setiap saat dan berulang-ulang; (4) peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dengan penyediaan komputer/laptop dan jaringan internet.

Kegiatan SKPP ini menggunakan metode campuran (mix method), perpaduan antara e-learning dengan penggunaan audio visual, media sosial dan aplikasi komunikasi serta ruang diskusi (meeting room) dengan menggunakan jaringan internet. Peserta melakukan pembelajaran dari rumah yang berlangsung selama 3 bulan (april-juni) mulai pada pendaftaran, proses pembelajaran audio visual, diskusi, web chat group dan ujian akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN Proses dan Pola Pembelajaran Pendaftaran daring yang dilakukan calon peserta adalah tahap awal proses pembelajaran melalui laman yang disediakan oleh bawaslu. Calon peserta diseleksi oleh bawaslu Provinsi dibantu bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta yang lolos akan mendapatkan username dan password melalui surel (email) masing-masing peserta pada saat pendaftaran.

Proses pendaftaran dan pembuatan akun pembelajaran paling lambat 5 mei 2020 pada web <https://bawasluskpp.net/>. Calon peserta tidak bisa mengikuti pada tahap pembelajaran, jika melakukan registrasi ulang. Setiap proses pembelajaran dilakukan pada akun masing-masing peserta yang telah dibuat.

Bawaslu Kabupaten membuat grup percakapan pada aplikasi whatsapp yang beranggotakan komisioner bawaslu, staf bawaslu dan peserta. Bawaslu Kalbar pada tanggal 2 mei 2020 melaksanakan launching SKPP secara daring dan live streaming dan ditonton oleh jajaran Bawaslu dan peserta di 14 Kabupaten/Kota. Peserta yang sudah memenuhi syarat dan izin akses dapat melihat tampilan dan berhak sepenuhnya mengikuti proses pada tahap kedua yakni mengakses video materi pembelajaran.

Peserta bisa melihat daftar peserta yang memenuhi syarat di menu pengumuman bawasluskpp.net/informasi. Selain itu peserta juga dipandu tata cara dalam pelaksanaan pengguna pada halaman bawasluskpp.net/panduan. Peserta belajar dengan cara

menonton video sesuai dengan topik yang dipelajari secara reguler di sistem jaringan yang tersedia.

Terdapat 9 topik dari total 50 slide audio visual yang ditampilkan dan diperbolehkan untuk memilih mengerjakan secara berurutan maupun acak. Setelah pertanyaan dijawab dan menyimpan data kedalam sistem dengan benar, peserta dapat melihat point yang diperoleh beserta arsip jawaban yang telah diisi. Peserta melakukan aktifitas mencatat, merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disampaikan tenaga pengajar.

Peserta juga diharuskan untuk memberikan pertanyaan tertutup dan ditulis dikolom yang disediakan dalam website atau akun peserta. Tabel 1. Topik dan Sub Topik Materi Pembelajaran No _Topik/Sub Topik _1 _Pemilu dan Pilkada : Konsepsi dan tujuan pemilu/ pilkada, sejarah pemilu/pilkada, Tahapan pelaksanaan Pemilu/ pilkada, keterlibatan masyarakat dalam pemilu/pilkada _2 _Regulasi Pemilu dan Pilkada : Landasan yuridis penyelenggaraan pemilu/pilkada, ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu/pilkada, problematika hukum kepemiluan dan aplikasi regulasi pemilu dan pilkada _3 _Pengawasan Pemilu dan Pilkada: Evaluasi pengawasan pemilu dan pilkada, metode pengawasan pemilu dan pilkada laporan hasil pengawasan pemilu dan pilkada, koordinasi antar penyelenggara pemilu _4 _Mekanisme Penanganan Pelanggaran : Pengantar penanganan pelanggaran pilkada, prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada non TSM, prosedur penanganan pelanggaran pilkada non TSM, prosedur penyampaian laporan dugaan tindak pidana pemilihan dan prosedur penanganannya.

Prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada secara TSM dan kode etik penyelenggara pemilu. _5 _Mekanisme Penyelesaian Sengketa : Pengantar tentang sengketa proses, fungsi penyelesaian sengketa, dasar hukum, subyek, obyek, alur penyelesaian, lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan _6 _Kerawanan Pilkada dan Pemilu : Pengertian kerawanan pemilu/pilkada, indikator kerawanan pemilu, penanganan kerawanan pemilu, penyusunan rekomendasi dan strategi pencegahan _7 _Pengawasan Partisipatif : Problem krusial pemilu/pilkada, konsep pengawasan partisipatif, metode partisipasi bawaslu, teknik pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, praktik-praktik pencegahan bawaslu _8 _Pemantau Pemilu : Dasar hukum pemantauan, syarat pemantauan pemilu/pilkada, lembaga pemantauan, tata cara pendaftaran, pengorganisasian relawan, pemantauan tahapan dan isu, tata cara pelaporan _9 _Strategi Kehumasan Kader Pengawas : Strategi komunikasi dan sosialisasi kader pengawas, kualifikasi kader pengawas, karakter kerelawanan, kebersamaan dan soliditas antarkader.

_ _Sumber : Instagram Bawaslu (@bawasluri), 2020 Proses pembelajaran secara daring sangat menyenangkan karena kita bisa mendapatkan ilmu dan mendengarkan paparan dari narasumber yang memiliki pandangan yang luas tentang pengawasan dari jajaran komisioner Kalbar yang terdiri dari Ruhermansyah (ketua), Faisal Riza, ST. MH (koordinator divisi pengawasan) dan Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I (koordinator divisi OSDM).

Peserta juga, bisa mendengar paparan materi dan penugasan khusus dari komisioner bawaslu di 22 provinsi di Indonesia. Penyampaian materi dari bawaslu Kalbar dimulai pada topik 4.2 tentang mekanisme pengawasan pemilu dan pilkada dengan sub topik evaluasi pengawasan. Materi berdurasi 14,04 menit disampaikan Faisal Riza menekankan pentingnya evaluasi melihat waktu dan obyeknya.

Waktu (timeline) evaluasi terdiri dari : (1) jangka pendek yang berisi laporan kinerja hasil pengawasan; (2) jangka menengah berkenaan dengan laporan secara periodik mengenai strategi pengawasan baik tahapan maupun non-tahapan; dan (3) jangka panjang memuat keseluruhan hasil pengawasan secara komprehensif. Sedangkan orientasi evaluasi mencakup tiga hal, yaitu : (1) tata kelola pengawasan; (2) budaya pengawasan; dan (3) hasil pengawasan (tahapan dan non tahapan).

Materi kedua disampaikan oleh aryana kasmayana pada topik 7.2 pengawasan partisipatif yang berdurasi 10.28 menit. Dalam audio visual tersebut aryana menyampaikan dasar hukum tentang pentingnya masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, yang termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 94 huruf d, pasal 98 (1) huruf d, dan pasal 102 (1) huruf d adalah upaya bawaslu ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pilkada.

Selain itu penting juga mengetahui tahapan dari kerja pengawasan yaitu : (1) pencegahan melalui sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat; (2) memberikan informasi awa; tentang dugaan pelanggaran; (3) adanya pengawasan untuk memantau jalannya sebuah pemilihan atau pilkada; dan (4) melaporkan kepada pengawas pemilu jika terdapat pelanggaran. Materi ketiga merupakan materi terakhir disampaikan ruhermansyah dalam topik 8.3 strategi kehumasan kader pengawas dengan durasi waktu 16.10 menit.

Penyampaian materi tersebut, mengurai tugas kehumasan yakni : (1) memberikan informasi dan komunikasi kepada stakeholder kunci (kepolisian, kejaksaan, pemerintah dan penyelenggara pemilu), utama (partai politik) dan pendukung (organisasi masyarakat, pemuda dan mahasiswa); (2) melakukan kerjasama pengawasan dengan

institusi lain dan menindaklanjutinya.

Dalam melakukan aktifitas kehumasan terdapat azas yang melekat yakni harus bersifat objektif, terbuka, jujur, profesional, akuntabel, berintegritas dan mematuhi kode etik dari pengawasan itu sendiri. Tabel 2. Partisipasi Pemateri dari Berbagai Provinsi No _Bawaslu /Tim Asistensi _Jumlah __1 _DKI Jakarta _6 __2 _Banten _1 __3 _Jawa Barat _4 __4 _Jata Tengah _2 __5 _Jawa Timur _2 __6 _DIY Yogyakarta _4 __7 _Sulawesi Selatan _4 __8 _Sulawesi Barat _1 __9 _Sulawesi Utara _2 __10 _Sulawesi Tenggara _3 __11 _Nusa Tenggara Barat _1 __12 _Nusa Tenggara Timur _2 __13 _Kalimantan Barat _3 __14 _Kalimantan Selatan _1 __15 _Kalimantan Timur _2 __16 _Kalimantan Utara _1 __17 _Sumatera Utara _1 __18 _Aceh _1 __19 _Riau _3 __20 _Bengkulu _1 __21 _Lampung _2 __22 _Jambi _2 __23 _Maluku _1 __ Total _50 __ Sumber : Instagram Bawaslu (@bawaslu), 2020 Tahap ketiga adalah diskusi daring yang diikuti sebanyak 193 dari 289 peserta yang telah mengikuti pembelajaran audio visual.

Berkurangnya peserta dikarenakan tidak lulus dan atau tidak menyelesaikan pembelajaran sampai selesai. Pada tahap ini, peserta belajar dan berdiskusi bersama **pengajar dalam satu forum** yang difasilitasi bawaslu provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota dan tim pokja yang terdiri dari Dr. Syf. Ema Rahmaniah (Akademisi FISIP universitas Tanjungpura), Aji Kurniawan (Korwil JPPR Kalbar) dan Umi Rifdiyawati, SH (Presidum JaDI Kalbar).

Jadwal pelaksanaan diskusi daring secara di Provinsi Kalimantan Barat pada 8 dan 11 Juni 2020 pukul 09.00-17.00 dengan menggunakan aplikasi zoom. Dalam diskusi ini terdapat 2 topik wajib yang harus didalami oleh peserta yakni tentang **pengawasan pemilu dan pilkada** dan pengawasan partisipatif. Tabel 3. Pembagian Kelas Peserta Kabupaten/Kota A _B _C __Kubu Raya _Mempawah _Pontianak __Kayong Utara _Sanggau _Sambas __Bengkayang _Sekadau _Landak __Singkawang _Kapuas Hulu _Melawi _ _ _Ketapang _ _ _Sintang __ Sumber : Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, 2020 Tahap keempat, peserta melakukan komunikasi dan belajar intensif dalam ruang grup komunikasi percakapan (web chat group) bersama dengan staf dan komisioner bawaslu Kabupaten.

Grup ini dibuat pada **tanggal 27 april 2020** dengan tujuan mempermudah saluran informasi dan komunikasi antara peserta dan pihak bawaslu Kabupaten. Tahap berikutnya yang merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran ini adalah diadakannya ujian daring dengan tujuan untuk mengukur pelajaran dan pembelajaran yang didapatkan. Ujian Daring dilaksanakan oleh bawaslu RI pada 17-30 juni 2020, dengan pemberian sertifikat sebagai tanda kelulusan.

Dalam mendukung proses pembelajaran, bawaslu memberikan insentif kepada setiap peserta sebesar 10 giga byte atau setara dengan Rp 25.000 pada tahap pembelajaran audio visual, diskusi daring dan ujian akhir daring. Indikator Capaian Keberhasilan Pembelajaran Keberhasilan e-learning ditunjang adanya interaksi yang baik antara pengajar, peserta dan fasilitas jaringan yang tersedia serta pola pembelajaran komunikasi dua arah (two way communication).

Berbeda dengan metode berbasis web, maka diperlukan adanya pusat kegiatan peserta didik, interaksi antar kelompok, administrasi penunjang sistem, pendalaman materi, ujian, dan materi online. (Hartanto, 2016). Keberhasilan pembelajaran dicapai pada setiap materi dengan standar yang telah disusun oleh tim pokja bawaslu. Peserta wajib mengikuti dan mengisi semua materi pembelajaran.

Setiap materi memiliki total bobot nilai sebesar 11 poin dengan passing grade kelulusan adalah 245 poin. Faktor Penghambat dalam Proses Pembelajaran Menurut (Lase, 2019), hadirnya revolusi industri 4.0, membuat lembaga pendidikan harus bersikap ramah dengan teknologi, para pendidik harus mengkolaborasikan pola konvensional dengan memanfaatkan literasi media agar lebih terbuka dan kreatif untuk menjawab kebutuhan peserta didik.

Bawaslu sendiri memulai inovasi dengan mengkolaborasikan pola pembelajaran kepemiluan terutama pengawasan partisipatif sebagai solusi ditengah pandemi covid-19, melihat sumberdaya internal dan jaringan organisasi masyarakat berbasis pemantau harus memiliki kompetensi yang tinggi. Bawaslu menggunakan metode campuran yang dipakai didasarkan pada memetakan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran ini seperti pertanyaan tertutup kepada pemateri yang tidak mendapat jawaban langsung pada waktu bersamaan. Maka dibuat diskusi daring bagi peserta untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan secara langsung.

Kelemahan berikutnya adalah penyampaian materi dalam satu topik yang sering berulang dan kurang efektif. Seharusnya materi disampaikan bisa dibagi secara spesifik oleh pengarah ditingkat tim bawaslu pusat. Beberapa Topik materi dengan sub topik kajian mendalam seperti mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran serta sanksi yang memerlukan alur proses dan tahapan yang panjang sehingga sulit untuk dipahami dan perlu waktu untuk mengulang materi tersebut.

Namun ada materi yang berisi sub topik yang singkat seperti pemantauan, pengawasan partisipatif dan strategi kehumasan. Menurut (Silahuddin, 2015) pengembangan sistem e- learning dalam pembelajaran pemilu dan pilkada harus dievaluasi dengan memperhitungkan sisi finansial, profitabilitas dan psikologis peserta.

Pengembangan yang dimaksud terutama terhadap komponen utama yakni infrastruktur dan sumber daya manusia agar pelaksanaan pembelajaran menjadi optimal. Komponen infrastruktur yang dimaksud seperti tersedianya ruang/laboratorium untuk rekaman video, editing audio, dan audio grafis dan animasi. Sedangkan komponen sumber daya manusia diantaranya tenaga instructional designer (ID), multimedia specialists, information technology (IT), online developer, online facilitator. (Ariani, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN Program ini merupakan agenda tahunan yang didesain bawaslub sebagai media pendidikan pengawasan kepada organisasi masyarakat diseluruh Indonesia. Pada tahun 2020 pelaksanaan yang berbasis internet membuat tingginya partisipasi peserta dari 34 provinsi. Hal ini dikarenakan ketertarikan calon peserta akan metode baru dan informasi pendaftaran tersedia sangat jelas dan tegas.

Adanya panduan pengguna akun web dan panduan pelaksanaan yang berisi nilai bobot setiap materi, timeline tahapan dan penyelesaian materi dan informasi update mengenai perkembangan pembelajaran peserta secara umum secara berkala dan profil singkat peserta. Metode ini bisa dikembangkan dengan memperkuat sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia sebagai komponen penting keberhasilan e-learning.

Sisi lain yang harus dipertimbangkan adalah kondisi daerah geografis dan terbatasnya sarana jaringan internet membuat proses belajar terhambat sehingga akan mempengaruhi timeline yang direncanakan dan keterlibatan pemateri dari komisioner bawaslub yang optimal dan menjangkau secara merata di seluruh provinsi. UCAPAN TERIMA KASIH Tim penulis mengapresiasi setinggi-tingginya atas program inovatif ini dan solidnya jajaran bawaslub ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota baik sebagai pengarah, tim pokja, pemateri dan staf pendukung yang telah memfasilitasi terlaksananya proses belajar daring sebagai wadah belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pemilu dan Pilkada. Hasil dari pembelajaran ini diharapkan dapat berkontribusi aktif dan produktif membantu bawaslub dalam Pilkada serentak.

DAFTAR RUJUKAN Buku [1] Rohmah, L. (2016). Konsep E-Learning Dan Aplikasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: An-nur. [2] Ramadhani, F. V. (2015). **Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan** di Indonesia atas kerjasama dengan Perludem. [3] Surbakti, R. d. (2015). Transformasi Bawaslub **dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan** Pemilu. Jakarta: **Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan** Indonesia.

[4] Suswanto, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Erlangga. Jurnal [5] Ariani, D.

(2018). Komponen Pengembangan E-Learning. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 1(1), 58-64. doi:10.21009/JPI.011.09 [6] Dahiya, S. J. (2016). An e-Learning System for Agricultural Education. *Indian Research Journal of Extension Education*, 12(3), 132-135. [7] Hartanto, W. (2016. 10/01). Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran.

JPE :*Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1-15. Diambil kembali dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/3438> [8] Lase, D. (2019). Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0. *JURNAL SUNDERMANN*, 1(1), 28-43. [9] Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *JIE : Jurnal Islamic Review*, 1(III), 117-146. [10] Silahuddin. (2015).

Penerapan E-LEARNING dalam Inovasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah CIRCUIT* , 1(1), 48-59. [11] Solihah, R. B. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28. [12] Sukma, P. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62. doi:10.24114/jupiis.v10i1.8407 [13] Triono. (2017).

Pemilu **Dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan** Pemerintah Yang Baik. , 214–232. . *Jurnal Agregasi*, 5(2), 214-232. doi:<https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447> Media Online/Website [14] Silaban, F. (2014). Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Diambil kembali dari bawaslu.go.id: <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif> [15] Pradana, J. (2019). Sepenggal Perjalanan Kewenangan Bawaslu. Diambil kembali dari bawaslu.go.id: <https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenangan-bawaslu> DOKUMENTASI KEGIATAN / Pengarahan Kepada Peserta oleh Ketua Bawaslu Ketapang _ Penyampaian Materi Kehumasan Melalui Website Akun Peserta _ _ Perwakilan Peserta Yang Hadir Saat Launching Se-Kalbar _ Diskusi Daring Peserta dan Bawaslu melalui zoom _ _

INTERNET SOURCES:

<1% -

<http://www.perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=530>

<1% - [http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/Firmansyah%20Noor%20Affandi\(1\).pdf](http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/Firmansyah%20Noor%20Affandi(1).pdf)

1% -

<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Layout%20Panduan%20SKPP.pdf>

<1% -

<https://kupang.antaranews.com/berita/31935/pandemi-covid-19-bukan-hambatan-untuk-berinovasi>

<1% -

<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Good-Governance-in-the-Public-Sector.pdf>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/24221912_A_Participatory_Workplace_Intervention_for_Employees_With_Distress_and_Lost_Time_A_Feasibility_Evaluation_Within_a_Randomized_Controlled_Trial

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/330012198_EVALUASI_PENYELENGGARAAN_DIKLAT_DI_KEMENTERIAN_AGAMA

<1% -

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah.html>

<1% -

<https://ayomilih2019.blogspot.com/2018/08/pemilu-bersih-tanpa-politik-uang.html>

<1% - https://kuk.untag-sby.ac.id/Monev/MONEV_2017.pdf

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/325322192_PENTINGNYA_PENGAWASAN_PARTISIPATIF_DALAM_MENGAWAL_PEMILIHAN_UMUM_YANG_BERINTEGRITAS_DAN_DEMOKRATIS/fulltext/5b05a27c0f7e9b1ed7e823fe/PENTINGNYA-PENGAWASAN-PARTISIPATIF-DALAM-MENGAWAL-PEMILIHAN-UMUM-YANG-BERINTEGRITAS-DAN-DEMOKRATIS.pdf

<1% -

<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/02%20JURNAL%20BAWASLU%202019.pdf>

<1% - <http://eprints.ums.ac.id/32104/2/BAB%20I.pdf>

<1% -

<https://sumberartikelartikel.blogspot.com/2014/06/kumpulan-pidato-dalam-acara.html>

<1% - <https://beritadarisultra.blogspot.com/2011/03/>

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__jumat_22_november_2019

<1% -

<https://minangkabaunews.com/artikel-25955-pilkada-serentak-pasca-perppu.html>

<1% - <https://www.slideshare.net/lesmanaputra9/uu-no-1-tahun-2015-tentang>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/329998890_KOMUNIKASI_DAN_MEDIA_SOSIAL

<1% - https://issuu.com/malutpost/docs/malut_post__08_juni_2015

<1% -

<https://mojokertokota.bawaslu.go.id/berita/34-millennial-kota-mojokerto-daftar-skpp-daring-nasional/>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/324892004_INTEGRASI_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI_DALAM_PEMBELAJARAN

<1% - <http://www.jurnal-erasha.ac.id/index.php/esit/article/download/162/121>

1% - <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/257426/elearning-dan-covid19>

<1% - <https://schoolmantic.com/blog/pembelajaran-berbasis-e-learning/>

<1% - <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jtk/article/download/2879/1919>

<1% - <https://fennyfenhesia.blogspot.com/2012/11/makalah-belajar-online.html>

<1% -

<https://bali.bawaslu.go.id/berita/bacaberita/786/agenda-kegiatan-sekolah-kader-pengawas-pemilu-partisipatif-skpp-bawaslu>

<1% -

<https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Layout%20Bahan%20Sosialisasi%20%281%29.pdf>

<1% - <http://www.saplax.top/contoh-pengaduan-pelanggaran-kode-etik-ke-dkpp/>

<1% -

<http://florespos.co.id/berita/detail/183-orang-ikuti-skpp-yang-diselenggarakan-bawaslu-ntt>

<1% -

<http://kalbar.bawaslu.go.id/berita/10/hadiri-sidang-dkpp-ri-sebagai-teradu-panwas-ketapang-yakin-tidak-melanggar-kode-etik>

<1% -

<https://docplayer.info/135914268-Skripsi-diajukan-untuk-memenuhi-salah-satu-syarat-memperoleh-gelar-sarjana-hukum-s-h-oleh-mia-arlitawati-nim.html>

<1% - <https://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/pilkada-dan-pemilu.html>

<1% - <https://unnes.ac.id/category/berita>

<1% - <http://bekasikab.go.id/tags/daerah>

<1% - https://issuu.com/harianberitametro/docs/berto_2912-01_combine

<1% -

<https://sumut.bawaslu.go.id/2020/05/01/2-mei-bawaslu-sumut-buka-skpp-daring/>

<1% -

<https://andintacastineputri.blogspot.com/2016/10/komunikasi-satu-dan-dua-arah-serta.html>

<1% -

<http://41514310002.blog.mercubuana.ac.id/2016/05/08/sistem-informasi-di-kampus/>

<1% - <https://bawasluskpp.net/pengumuman>

<1% - https://issuu.com/aryaoka/docs/buku_mm_merge

<1% - <http://promkes.kemkes.go.id/feed/rss.php?cat=dn>

<1% - <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/950>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/334946367_Peningkatan_Kemampuan_Literasi_Teknologi_dalam_Upaya_Mengembangkan_Inovasi_Pendidikan_di_Perguruan_Tinggi

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/332965656_Pengelolaan_Pemerintah_dalam_Pengaturan_Pulau-Pulau_Kecil_Terluar_Indonesia